



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

**PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 29 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN**

**BAPPEDA KOTA PARIAMAN
2019**



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 29 TAHUN 2019
T E N T A N G
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja perlu disusun Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara RI Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 165);
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Pengelola Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
6. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
7. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
10. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
11. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan
12. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II
RUANG LINGKUP INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 2

IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kota Pariaman dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman untuk :

- a. penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pengukuran kinerja;
- e. penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 3

(IKU) di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Walikota ini :

- a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman dan Bagian Organisasi & Aparatur Setda Kota Pariaman diberikan tugas untuk melakukan review dan evaluasi atas pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
- b. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Inspektorat Kota Pariaman melakukan evaluasi atas capaian kinerja

Indikator Kinerja Utama setiap Perangkat Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 5

IKU Pemerintah Kota Pariaman disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAB III : PENUTUP

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 22 Juli 2019

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 22 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN



INDRA SAKTI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 29

Lampiran 1 Peraturan Walikota Pariaman
Nomor : 29 Tahun 2019
Tanggal : 22 Juli 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan pemerintahan yang baik (good governance) seiring dengan program reformasi birokrasi bahwa kebijakan umum pemerintah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupaya menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui program dan kegiatan. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja bukan kemampuan menyerap anggaran, karena prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah no performance, no money (apabila tidak ada kinerja atau tidak berkinerja, maka tidak ada uang atau tidak memperoleh anggaran).

Oleh karena itu, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam upaya mewujudkan good governance dan result oriented government, perlu dikembangkan dan informasi kerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan penganggaran selaras dengan perencanaan kinerja. Dengan demikian perencanaan anggaran yang disusun betul-betul anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja akan mempermudah dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kerjanya sesuai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan pemerintahan yang baik adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan IKU sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan

kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap program/kegiatan dan hasil akhir dari program/kegiatan setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintahan yang akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal tersebut sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pengukuran kinerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan demikian pemerintah Kota Pariaman menetapkan IKU dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Pariaman, maka dipandang perlu menetapkan IKU, dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka pemerintah Kota Pariaman perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam perencanaan kinerja tahunan IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.

BAB III

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman diharapkan dapat dijadikan pedoman / ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan dari seluruh elemen pemerintah yang ada di Kota Pariaman, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama ini, diharapkan para pimpinan Perangkat Daerah tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

Lampiran II Peraturan Walikota Pariaman		
Nomor	:	29
Tanggal	:	22 Juli 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	OPD Penanggung Jawab															
1	2	3	4	5	6															
1.	Meningkatkan Kualitas SDM	IPM	<p>IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kesehatan 2. Indeks Pendidikan 3. Indeks Pengeluaran <p>IPM Dihitung Sebagai Rata-Rata Geometrik Dari Indeks Kesehatan, Pendidikan Dan Pengeluaran dengan Rumus :</p> $IPM = \sqrt[3]{\text{Indeks Kesehatan} \times \text{Indeks Pendidikan} \times \text{Indeks Pengeluaran}}$ <table border="1"> <tr> <td colspan="3">Dimana :</td> </tr> <tr> <td>IPM</td> <td>:</td> <td>Indeks Pembangunan Manusia</td> </tr> <tr> <td>Indeks Kesehatan</td> <td>:</td> <td>Diambil dari Angka Harapan Hidup</td> </tr> <tr> <td>Indeks Pendidikan</td> <td>:</td> <td>Diambil dari Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah</td> </tr> <tr> <td>Indeks Pengeluaran</td> <td>:</td> <td>Diambil dari PDB Perkapita</td> </tr> </table>	Dimana :			IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Kesehatan	:	Diambil dari Angka Harapan Hidup	Indeks Pendidikan	:	Diambil dari Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah	Indeks Pengeluaran	:	Diambil dari PDB Perkapita	BPS	<p>OPD Penanggung Jawab Utama :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan KUKM 4. Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan 5. Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja 6. Dinas Pariwisata & Kebudayaan <p>OPD Pendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda 2. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan 4. Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat, Dan Lingkungan Hidup 5. Desa dan Kelurahan se Kota Pariaman
Dimana :																				
IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia																		
Indeks Kesehatan	:	Diambil dari Angka Harapan Hidup																		
Indeks Pendidikan	:	Diambil dari Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah																		
Indeks Pengeluaran	:	Diambil dari PDB Perkapita																		

2.	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Angka Pertumbuhan Ekonomi	<p>Angka Pertumbuhan Ekonomi adalah Pertumbuhan Produksi Barang Dan Jasa Disuatu Wilayah Perekonomian Dalam Selang Waktu Tertentu, Yang Dihitung Dengan Rumus :</p> $R = \frac{PDRB_{(t)} - PDRB_{(t-1)}}{PDRB_{(t-1)}} \times 100$ <p>Dimana :</p> <table border="1" data-bbox="932 423 1789 639"> <tr> <td>R</td> <td>:</td> <td>Pertumbuhan Ekonomi Yang Dinyatakan Dalam Persen (%)</td> </tr> <tr> <td>PDRB</td> <td>:</td> <td>Produk Domestik Regional Bruto</td> </tr> <tr> <td>PDRB_(t)</td> <td>:</td> <td>PDRB Pada Tahun (t)</td> </tr> <tr> <td>PDRB_(t-1)</td> <td>:</td> <td>PDRB Pada Tahun (t-1)</td> </tr> </table>	R	:	Pertumbuhan Ekonomi Yang Dinyatakan Dalam Persen (%)	PDRB	:	Produk Domestik Regional Bruto	PDRB _(t)	:	PDRB Pada Tahun (t)	PDRB _(t-1)	:	PDRB Pada Tahun (t-1)	BPS	<p>OPD Penanggung Jawab Utama :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan KUKM 2. Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan 3. Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja 4. Dinas Pariwisata & Kebudayaan <p>OPD Pendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan 2. Bappeda 3. Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat, Dan Lingkungan Hidup 4. Desa dan Kelurahan se Kota Pariaman 			
R	:	Pertumbuhan Ekonomi Yang Dinyatakan Dalam Persen (%)																		
PDRB	:	Produk Domestik Regional Bruto																		
PDRB _(t)	:	PDRB Pada Tahun (t)																		
PDRB _(t-1)	:	PDRB Pada Tahun (t-1)																		
3.	Menurunnya Kemiskinan di Kota Pariaman	Angka Kemiskinan	<p>Persentase Angka Kemiskinan adalah : Persentase Penduduk Yang Berada Dibawah Garis Kemiskinan (GK)</p> $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left(\frac{Z - y_i}{z} \right)^{\alpha}$ <p>Dimana :</p> <table border="1" data-bbox="932 1143 1789 1386"> <tr> <td>α</td> <td>:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Z</td> <td>:</td> <td>Garis Kemiskinan</td> </tr> <tr> <td>Y₁</td> <td>:</td> <td>Rata-Rata Pengeluaran Penduduk Yang Berada Dibawah Garis Kemiskinan (l=1,2,3.....,q), $y_i < Z$</td> </tr> <tr> <td>Q</td> <td>:</td> <td>Banyak Penduduk Yang Berada Garis Kemiskinan</td> </tr> <tr> <td>n</td> <td>:</td> <td>Jumlah Penduduk</td> </tr> </table>	α	:	0	Z	:	Garis Kemiskinan	Y ₁	:	Rata-Rata Pengeluaran Penduduk Yang Berada Dibawah Garis Kemiskinan (l=1,2,3.....,q), $y_i < Z$	Q	:	Banyak Penduduk Yang Berada Garis Kemiskinan	n	:	Jumlah Penduduk	BPS	<p>OPD Penanggung Jawab Utama :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Sosial 2. Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan KUKM 5. Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan 6. Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja 7. Dinas Pariwisata & Kebudayaan <p>OPD Pendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda 2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
α	:	0																		
Z	:	Garis Kemiskinan																		
Y ₁	:	Rata-Rata Pengeluaran Penduduk Yang Berada Dibawah Garis Kemiskinan (l=1,2,3.....,q), $y_i < Z$																		
Q	:	Banyak Penduduk Yang Berada Garis Kemiskinan																		
n	:	Jumlah Penduduk																		

					3. Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat, Dan Lingkungan Hidup 4. Desa dan Kelurahan se Kota Pariaman																								
4.	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk	Indeks Gini	<p>Indeks Gini atau Gini Ratio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.</p> <p>Rumus dari koefisien Gini :</p> $G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})$ <table border="1" data-bbox="932 711 1789 883"> <tr> <td colspan="3">Dimana :</td> </tr> <tr> <td>GR</td> <td>:</td> <td>Koefisien Gini (Gini Ratio)</td> </tr> <tr> <td>Pi</td> <td>:</td> <td>Frekuensi Penduduk Dalam Kelas Pengeluaran Ke-i</td> </tr> <tr> <td>Qi</td> <td>:</td> <td>Presentase Kumulatif Total Pendapatan atau Pengeluaran Sampai Kelas Ke-i</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="1059 919 1647 1060"> <tr> <td colspan="3">Nilai Gini Ratio Berkisar Antara 0 dan 1 Jika :</td> </tr> <tr> <td>G , 0,3</td> <td>=</td> <td>Ketimpangan Rendah</td> </tr> <tr> <td>0,3 < G < 0,5</td> <td>=</td> <td>Ketimpangan Sedang</td> </tr> <tr> <td>G > 0,5</td> <td>=</td> <td>Ketimpangan Tinggi</td> </tr> </table>	Dimana :			GR	:	Koefisien Gini (Gini Ratio)	Pi	:	Frekuensi Penduduk Dalam Kelas Pengeluaran Ke-i	Qi	:	Presentase Kumulatif Total Pendapatan atau Pengeluaran Sampai Kelas Ke-i	Nilai Gini Ratio Berkisar Antara 0 dan 1 Jika :			G , 0,3	=	Ketimpangan Rendah	0,3 < G < 0,5	=	Ketimpangan Sedang	G > 0,5	=	Ketimpangan Tinggi	BPS	<p>OPD Penanggung Jawab Utama :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan 2. Dinas Sosial 3. Dinas Perindag & KUKM 4. Dinas PTSP, PM & Naker 5. Dinas Pariwisata & Kebudayaan <p>OPD Pendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3. Kecamatan Kota Pariaman 4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan 5. Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat, Dan Lingkungan Hidup 6. Desa dan Kelurahan se Kota Pariaman
Dimana :																													
GR	:	Koefisien Gini (Gini Ratio)																											
Pi	:	Frekuensi Penduduk Dalam Kelas Pengeluaran Ke-i																											
Qi	:	Presentase Kumulatif Total Pendapatan atau Pengeluaran Sampai Kelas Ke-i																											
Nilai Gini Ratio Berkisar Antara 0 dan 1 Jika :																													
G , 0,3	=	Ketimpangan Rendah																											
0,3 < G < 0,5	=	Ketimpangan Sedang																											
G > 0,5	=	Ketimpangan Tinggi																											

Lampiran III Peraturan Walikota Pariaman	
Nomor	: 29
Tanggal	: 22 Juli 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga				
a.	Meningkatnya Akseibilitas dan Pemerataan Pendidikan	1) Angka rata-rata lama sekolah	<p>Angka rata-rata lama sekolah adalah : Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.</p> <p>Angka rata-rata lama sekolah dapat dihitung dengan rumus :</p> $\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas dan Lama Pendidikan Yang Ditamatkan/Dijalani}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas}} \times 100$	BPS	- Bidang Pendidikan SMP
		2) Angka harapan lama sekolah	<p>Angka harapan lama sekolah adalah : sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.</p> <p>Angka harapan lama sekolah dapat dihitung dengan rumus :</p> $\frac{\text{Penjumlahan dari Penduduk Yang Bersekolah Usia 7-23 Tahun menurut umur}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas}} \times 100$	BPS	- Bidang Pendidikan SMP

b.	Meningkatnya Mutu Pendidikan	1) Presentase SD dan SMP yang terakreditasi A	Presentase SD dan SMP yang terakreditasi A dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Jumlah SD dan SMP Yang Terakreditasi A}}{\text{Jumlah SD dan SM}} \times 100$	Laporan Bidang Pendidikan Dasar dan SMP	- Bidang Pendidikan SD - Bidang Pendidikan SMP
		2) Presentase nilai ujian nasional siswa SMP rata-rata 7	Presentase nilai ujian nasional siswa rata-rata 7 untuk SMP dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Jumlah Siswa SMP Yang Mengikuti Ujian Nasional}}{\text{Jumlah siswa SMP yang mencapai nilai rata-rata minimal 7}} \times 100$	Laporan Bidang Pendidikan SMP	- Bidang Pendidikan SMP
2. Dinas Kesehatan					
a.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1) Angka Usia Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup adalah : Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Laporan tribulanan dan tahunan	- Bidang Yankes - Bidang Kesmas - Bidang P2P
		2) Indeks Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat dapat dihitng dengan rumus : $\frac{\text{Jumlah indeks kelompok indikator}}{\text{Jumlah kelompok indikator}} \times 100$	Laporan Hasil Pendataan Keluarga Sehat	- Bidang Yankes - Bidang Kesmas - Bidang P2P
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan					
a.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	1) Persentase panjang jalan kota dalam kondisi mantap	% Panjang jalan Kota dalam kondisi mantap dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi mantap}}{\text{Panjang Jalan Seluruh Kota}} \times 100$	Data Laporan Survey Jalan	- Bidang Bina Marga
		2) Persentase jalan yang memiliki saluran drainase/gorong-gorong yang berfungsi baik	% Panjang drainase Kota dalam kondisi baik dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Panjang drainase Kota dalam kondisi baik}}{\text{Panjang drainase seluruh Kota}} \times 100$	Data Laporan Survey Drainase	- Bidang Pengairan - Bina Marga

		3) Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik	% Luas Jaringan irigasi dalam kondisi baik dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Luas irigasi Kota dalam kondisi baik}}{\text{Total Luas irigasi}} \times 100$	Data Laporan Survey Irigasi	- Bidang Pengairan
		4) Persentase Ketersediaan Bangunan Pemerintah	% Ketersediaan Bangunan Pemerintah dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Jumlah Bangunan Pemerintah Yang Sudah Dibangun}}{\text{Total Jumlah Bangunan Pemerintah Yang Seharusnya DiBangun}} \times 100$	Laporan Data Bangunan Pemerintah	- Bidang Tata Ruang Penataan Bangunan
b.	Meningkatnya ketersediaan RTH	1) Persentase kecukupan luasan RTH publik	% kecukupan luasan RTH publik dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Luas RTH Publik Yang Tersedia}}{20 \% \text{ dari Luas Wilayah Perkotaan}} \times 100$	Data RTH Publik	- Bidang Tata Ruang
4. Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat & LH					
a.	Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak	1) Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	% Penurunan Rumah Tidak Layak Huni dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (n) - Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (n) yang ditangani}}{\text{Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (n)}} \times 100$	Rekap Data Laporan Rumah Tidak Layak Huni	- Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
		2) Presentase Akses Sanitasi Layak	% Akses Sanitasi Layak dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi Layak}}{\text{Jumlah Total Rumah Tinggal}} \times 100$	Laporan dari RP3KP	- Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
		3) Persentase Penurunan lingkungan pemukiman kumuh	% Penurunan Penurunan lingkungan pemukiman kumuh dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Luas RTH Publik Yang Tersedia}}{20 \% \text{ dari Luas Wilayah Perkotaan}} \times 100$	Rekap Data Luas Lingkungan Kumuh Perkotaan	- Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

		4) Persentase penduduk berakses air minum	% penduduk berakses air minum dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Penduduk berakses air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$	Data PDAM dan Data Penduduk Yang Terakses	- UPTD. Air Bersih																		
b	Menurunnya Tingkat Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1) Indeks Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan dapat dihitung dengan rumus : $= (30\% \times \text{IPU}) + (30\% \times \text{IPA}) + (40\% \times \text{ITH})$ Keterangan : <table border="1"> <tr> <td>IPU</td> <td>=</td> <td>Indeks Pencemaran Udara</td> </tr> <tr> <td></td> <td>=</td> <td>$100 - \{50/0.9 \times (\text{tot IEU}/2-0.1)\}$</td> </tr> <tr> <td>IPA</td> <td>=</td> <td>Indeks Pencemaran Air</td> </tr> <tr> <td></td> <td>=</td> <td>Total Nilai = Nilai Koefisien x Persen</td> </tr> <tr> <td>ITH</td> <td>=</td> <td>Indeks Tutupan Hutan/Lahan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>=</td> <td>$100 - \{ (84.3 - (\text{Hutan/Luas Wil} \times 100) \times (50/54.3) \}$</td> </tr> </table>	IPU	=	Indeks Pencemaran Udara		=	$100 - \{50/0.9 \times (\text{tot IEU}/2-0.1)\}$	IPA	=	Indeks Pencemaran Air		=	Total Nilai = Nilai Koefisien x Persen	ITH	=	Indeks Tutupan Hutan/Lahan		=	$100 - \{ (84.3 - (\text{Hutan/Luas Wil} \times 100) \times (50/54.3) \}$	DIKPLHD	- Bidang Kebersihan - Bidang P2PPLH - Bidang P2KLH,
IPU	=	Indeks Pencemaran Udara																					
	=	$100 - \{50/0.9 \times (\text{tot IEU}/2-0.1)\}$																					
IPA	=	Indeks Pencemaran Air																					
	=	Total Nilai = Nilai Koefisien x Persen																					
ITH	=	Indeks Tutupan Hutan/Lahan																					
	=	$100 - \{ (84.3 - (\text{Hutan/Luas Wil} \times 100) \times (50/54.3) \}$																					
5. Satuan Pol PP																							
a	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial	1) Indeks Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Indeks Penegakan Peraturan Daerah dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda/Perwako Tahun (n-1) - Jumlah Pelanggaran Perda/Perwako tahun (n)}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda/Perwako Tahun (n)}} \times 100$	Data pelanggaran terhadap peraturan oleh masyarakat	- Bidang Penegakan Peraturan Daerah Perundang-undangan																		
		2) Indeks Penanganan Gangguan dan Ancaman Trantibum	Indeks Penanganan Gangguan dan Ancaman Trantibum dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Jumlah kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang tertangani}}{\text{Jumlah kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang ada}} \times 100$	Data penanganan gangguan trantib oleh pihak terkait	- Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat																		

b	Terkendalinya bahaya kebakaran	1) Tingkat waktu tanggap (response time rate)	Tingkat waktu tanggap (response time rate) adalah : Lama waktu tanggap penanggulangan kebakaran diwilayah kota pariaman	SOP Tingkat Waktu Tanggap	- Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
		2) Proporsi sarana prasarana yang tersedia sesuai standard	Proporsi sarana prasarana yang tersedia sesuai standard dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Tersedia Sudah Sesuai Standar}}{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan}} \times 100$	Laporan Kondisi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	- Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
		3) Proporsi personil penanggulangan kebakaran yang terlatih dan kompeten	Proporsi personil penanggulangan kebakaran yang terlatih dan kompeten dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Jumlah Personil yang kompeten}}{\text{Jumlah Personil seluruhnya}} \times 100$	Sertifikat Personil dan Data Jumlah Personil	- Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
6	Dinas Sosial				
a	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial PMKS	1) Persentase Peningkatan PMKS Yang Mampu Memenuhi Kebutuhan Dasar	Persentase Peningkatan PMKS Yang Mampu Memenuhi Kebutuhan Dasar dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Jumlah PMKS Yang Memenuhi Kebutuhan Dasar}}{\text{Jumlah PMKS}} \times 100$	Laporan Data PMKS	- Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB				
a	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender disegala bidang	1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dapat dihitung dengan rumus : $= 1/3 (Ipar+IDM+Lin-Dist)$ Keterangan : Ipar = Indeks Keterwakilan Perempuan di parlemen IDM = Indeks Pengambilan Keputusan	Data Pemberdayaan Gender	- Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

			<table border="1"> <tr> <td>Linc-dis</td> <td>=</td> <td>Indeks Distribusi Pendapatan</td> </tr> <tr> <td>Definisi Operasional</td> <td>=</td> <td>Cakupan PUS yang ingin yang ber-KB tidak terpenuhi (Unmmet Need) adalah Proporsi Pasangan Usia Subur 15 - 49 tahun yang tidak menggunakan alat/ cara KB tetapi tidak ingin punya anak lagi dan ingin anak tapi tunda.</td> </tr> </table>	Linc-dis	=	Indeks Distribusi Pendapatan	Definisi Operasional	=	Cakupan PUS yang ingin yang ber-KB tidak terpenuhi (Unmmet Need) adalah Proporsi Pasangan Usia Subur 15 - 49 tahun yang tidak menggunakan alat/ cara KB tetapi tidak ingin punya anak lagi dan ingin anak tapi tunda.		
Linc-dis	=	Indeks Distribusi Pendapatan									
Definisi Operasional	=	Cakupan PUS yang ingin yang ber-KB tidak terpenuhi (Unmmet Need) adalah Proporsi Pasangan Usia Subur 15 - 49 tahun yang tidak menggunakan alat/ cara KB tetapi tidak ingin punya anak lagi dan ingin anak tapi tunda.									
b	Meningkatnya Akses dan Kualitas pelayanan Keluarga Berencana	1) Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49	Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49 dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}}$	Data Peserta KB	- Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
		2) Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmmet need)	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmmet need) dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber KB tapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}}$	Data Peserta KB	- Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil										
a	Meningkatnya Kualitas layanan administrasi kependudukan	1) IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	IKM-1	Hasil Survei	- Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Bidang Kependudukan						
b	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	2) Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Jumlah Kepemilikan Dokumen Kependudukan}}{\text{Total Jumlah Dokumen Kependudukan Yang Seharusnya}} \times 100$								
		3) Prosentase Cakupan	Prosentase Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga dapat dihitung dengan rumus :	Data Dokumen Kependudukan	- Bidang Pengelolaan						

		Penerbitan Kartu Keluarga	$\frac{\text{Jumlah KK Yang Sudah Diterbitkan}}{\text{Jumlah KK Yang Seharusnya Diterbitkan}} \times 100$		Informasi Administrasi Kependudukan - Bidang Kependudukan
		4) Prosentase Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP - el)	Prosentase Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP - el) dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Jumlah KTP Yang Sudah Diterbitkan}}{\text{Jumlah KTP Yang Seharusnya Diterbitkan}} \times 100$	Data Rekapitulasi KTP Yang Sudah Diterbitkan	- Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Bidang Kependudukan
		5) Prosentase Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Prosentase Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Jumlah KIA Yang Sudah diterbitkan}}{\text{Jumlah KIA Yang Seharusnya Diterbitkan}} \times 100$	Data Rekapitulasi KIA Yang Sudah Diterbitkan	- Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Bidang Kependudukan
		6) Prosentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)	Prosentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran (0-18 Tahun) dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Jumlah Akta Kelahiran Yang Sudah Diterbitkan}}{\text{Jumlah Akta Kelahiran Yang Seharusnya Diterbitkan}} \times 100$	Data Rekapitulasi Akta Kelahiran Yang Sudah Diterbitkan	- Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Bidang Kependudukan
		7) Prosentase Cakupan Penerbitan Akta Kematian	Prosentase Cakupan Penerbitan Akta Kematian dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Jumlah Akta Kematian Yang Sudah Diterbitkan}}{\text{Jumlah Akta Kematian Yang Seharusnya Diterbitkan}} \times 100$	Data Rekapitulasi Akta Kematian Yang Sudah Diterbitkan	- Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Bidang Kependudukan
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				
a	Meningkatnya Kemandirian	1) Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks Desa Membangun (IDM) dapat dihitung dengan rumus :	Data Laporan Perkembangan Desa	- Bidang Penyelenggaraan

			$\frac{\text{Rata-rata IDM Desa}}{\text{Jumlah Seluruh Desa}} \times 100$ <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Keterangan :</td> </tr> <tr> <td>Indeks Desa Memban gun (IDM)</td> <td>= Merupakan Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.</td> </tr> <tr> <td>IDM</td> <td>= $IDM = 1/3 (IKE + IKS + IKL)$</td> </tr> <tr> <td>IKE</td> <td>= Indeks Ketahanan Ekonomi</td> </tr> <tr> <td>IKS</td> <td>= Indeks Kehatanan Sosial</td> </tr> <tr> <td>IKL</td> <td>= Indeks Ketahahan Lingkungan</td> </tr> </table>	Keterangan :		Indeks Desa Memban gun (IDM)	= Merupakan Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.	IDM	= $IDM = 1/3 (IKE + IKS + IKL)$	IKE	= Indeks Ketahanan Ekonomi	IKS	= Indeks Kehatanan Sosial	IKL	= Indeks Ketahahan Lingkungan		Pemeritahan - Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Keterangan :																	
Indeks Desa Memban gun (IDM)	= Merupakan Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.																
IDM	= $IDM = 1/3 (IKE + IKS + IKL)$																
IKE	= Indeks Ketahanan Ekonomi																
IKS	= Indeks Kehatanan Sosial																
IKL	= Indeks Ketahahan Lingkungan																
b	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Desa	2) Persentase kelembagaan Desa Yang berkualitas	Persentase kelembagaan Desa Yang berkualitas dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Jumlah kelembagaan Desa Yang berkualitas}}{\text{Jumlah Seluruh kelembagaan Desa Dimiliki}} \times 100$	Laporan Kelembagaan Desa	- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa												
10	Dinas Perhubungan																
a	Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas	1) Indeks angka kecelakaan lalu lintas	Indeks angka kecelakaan lalu lintas dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Jumlah kejadian kecelakaan}}{\text{jumlah penduduk}}$	Laporan data kecelakaan lalu lintas	- Bidang TSKAD - Bidang Angkutan												
b	Meningkatnya pelayanan publik bidang perhubungan	1) IKM Bidang Pelayanan Transportasi	Nilai IKM-1	Laporan Hasil Survei IKM	- Bidang TSKAD - Bidang Angkutan - UPT Parkir												
11	Dinas Komunikasi Dan Informasi																
a	Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi	1) Indeks Sistem Pemerintahan	Indeks SPBE n-1	Hasil Penilaian Indeks SPBE	- Bidang e-Gov												

	dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Berbasis Elektronik (SPBE)		dari Kemenpan RI	
b	Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik Berbasis Teknologi Informasi	1) Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik n-1	Hasil Penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Daerah	- Bidang IKP
12	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah				
a	Meningkatnya laju pertumbuhan Koperasi Sehat	1) Laju Pertumbuhan Koperasi Sehat	Laju Pertumbuhan Koperasi Sehat dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Jumlah Koperasi Sehat Tahun (n)} - \text{Jumlah Koperasi Sehat Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah Koperasi Sehat Tahun (n-1)}} \times 100$	Data Laporan Koperasi	- Bidang UMKM
b	Meningkatnya laju pertumbuhan UMKM	1) Laju Pertumbuhan UMKM	Laju Pertumbuhan UMKM dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Jumlah UMKM Tahun (n)} - \text{Jumlah UMKM Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah UMKM Tahun (n-1)}} \times 100$	Data Laporan UMKM	- Bidang UMKM
c	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan	1) Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Jumlah Sektor Perdagangan Tahun (n)} - \text{Jumlah Sektor Perdagangan Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah Sektor Perdagangan Tahun (n-1)}} \times 100$	Data Laporan Sektor Perdagangan	- Bidang Perdagangan

d	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perindustrian	1) Laju Pertumbuhan Sektor Perindustrian	Laju Pertumbuhan Sektor Perindustrian dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Jumlah Sektor Perindustrian Tahun (n)} - \text{Jumlah Sektor Perindustrian Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah Sektor Perindustrian Tahun (n-1)}} \times 100$	Data Laporan Sektor Perindustrian	- Bidang Perindustrian
13 Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja					
a	Meningkatnya Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1) IKM Pelayanan Peizinan	IKM-1	Hasil Survey IKM	- Bidang PTSP
b	Meningkatnya pertumbuhan nilai investasi	1) Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Jumlah Nilai Investasi Tahun (n)} - \text{Jumlah Nilai Investasi Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah Nilai Investasi Tahun (n-1)}} \times 100$	Data Laporan Investasi	- Bidang Penanaman Modal
c	Meningkatnya Kesempatan Kerja	1) Persentase Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Peningkatan Kesempatan Kerja dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Jumlah Kesempatan Kerja Tahun (n)} - \text{Jumlah Kesempatan Kerja Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah Kesempatan Kerja Tahun (n-1)}} \times 100$	Data Laporan Pasar Kerja	- Bidang Ketenagakerjaan
14 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan					
a	Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat	1) Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan wisatawan pada tahun (n)	Rekapitulasi Data Jumlah Kunjungan	- Bidang Destinasi dan Daya Tarik Wisata - Bidang Promosi dan Kerjasama Wisata

		2) Length of Stay (Rata-rata Lama Tinggal)	Survey lama tinggal wisatawan	Hasil survey lama tinggal	- Bidang Destinasi dan Daya Tarik Wisata - Bidang Promosi dan Kerjasama Wisata				
		3) Jumlah budaya lokal yang dilestarikan	Jumlah budaya lokal yang dilestarikan	Rekapitulasi jumlah budaya lokal yang dilestarikan	- Bidang Kebudayaan				
15	Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan								
a	Meningkatnya Produksi Pertanian, Perikanan dan Pertenakan	1) Jumlah Produksi Pertanian (padi)	Total Jumlah Produksi Pertanian Tahun (n-1)	Data Laporan Jumlah Produksi Bidang Pertanian	- Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan				
		2) Jumlah Produksi Perikanan	Total Jumlah Produksi Perikanan Tahun (n-1)	Data Laporan Jumlah Produksi Bidang Perikanan	- Bidang Perikanan dan Kelautan				
		3) Jumlah Produksi Peternakan	Total Jumlah Produksi Peternakan Tahun (n-1)	Data Laporan Jumlah Produksi Bidang Peternakan	- Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan				
b	Meningkatnya Ketahanan Pangan	1) Skor PPH Ketersediaan	<p>Metode susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama untuk menilai ketersediaan pangan. Semakin tinggi skor mutu pangan, menunjukkan situasi ketersediaan pangan yang semakin baik dan beragam.</p> <p>Komposisi kelompok pangan utama yang menjadi objek analisa adalah :</p> <table border="1" data-bbox="1049 1268 1876 1408"> <tr> <td>1.</td> <td>Padi (Beras, Jagung, terigu)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Umbi-umbian (Ubi kayu, Ubi jalar, Kentang, Talas, Sagu, dan Umbi lainnya)</td> </tr> </table>	1.	Padi (Beras, Jagung, terigu)	2.	Umbi-umbian (Ubi kayu, Ubi jalar, Kentang, Talas, Sagu, dan Umbi lainnya)	BPS, data hasil analisa pangan	- Bidang Ketahanan Pangan
1.	Padi (Beras, Jagung, terigu)								
2.	Umbi-umbian (Ubi kayu, Ubi jalar, Kentang, Talas, Sagu, dan Umbi lainnya)								

			<table border="1"> <tr> <td>3.</td> <td>Pangan hewani (Daging, Telur, Susu, dan Ikan)</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Minyak dan lemak (Minyak kelapa, minyak lainnya)</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Buah Biji Berminyak (Kelapa, Kemiri, Jambu mente, Coklat)</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Kacang-kacangan (Kedelai, Kacang tanah, Kacang Hijau, Kacang Merah,</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Gula (Gula pasir dan Gula Merah)</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Sayur dan Buah (Semua jenis sayuran dan Buah-Buahan)</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Lain-lain (Bumbu-bumbuan, makanan dan minuman yang mengandung alkohol, teh, kopi, sirup, dll)</td> </tr> </table>	3.	Pangan hewani (Daging, Telur, Susu, dan Ikan)	4.	Minyak dan lemak (Minyak kelapa, minyak lainnya)	5.	Buah Biji Berminyak (Kelapa, Kemiri, Jambu mente, Coklat)	6.	Kacang-kacangan (Kedelai, Kacang tanah, Kacang Hijau, Kacang Merah,	7.	Gula (Gula pasir dan Gula Merah)	8.	Sayur dan Buah (Semua jenis sayuran dan Buah-Buahan)	9.	Lain-lain (Bumbu-bumbuan, makanan dan minuman yang mengandung alkohol, teh, kopi, sirup, dll)		
3.	Pangan hewani (Daging, Telur, Susu, dan Ikan)																		
4.	Minyak dan lemak (Minyak kelapa, minyak lainnya)																		
5.	Buah Biji Berminyak (Kelapa, Kemiri, Jambu mente, Coklat)																		
6.	Kacang-kacangan (Kedelai, Kacang tanah, Kacang Hijau, Kacang Merah,																		
7.	Gula (Gula pasir dan Gula Merah)																		
8.	Sayur dan Buah (Semua jenis sayuran dan Buah-Buahan)																		
9.	Lain-lain (Bumbu-bumbuan, makanan dan minuman yang mengandung alkohol, teh, kopi, sirup, dll)																		
		2) Skor PPH Konsumsi	Metode susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama untuk menilai ketersediaan pangan. Semakin tinggi skor mutu pangan, menunjukkan situasi pangan semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya. Komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Komposisi kelompok pangan utama yang menjadi obyek analisis adalah sama dengan obyek analisa yang digunakan untuk menghitung Skor PPH Ketersediaan.	BPS, data hasil analisa pangan	- Bidang Ketahanan Pangan														
16	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah																		
a	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1) Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam perencanaan pembangunan daerah	% terpenuhinya aspek kualitas dalam perencanaan pembangunan daerah = 40 % x (capaian kinerja OPD) + 30 % (Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan) + 30 % x (persentase perencanaan pembangunan berlandaskan inovasi melalui penguatan penelitian & pengembangan)	Data hasil dari ketiga komponen pembentuk terpenuhinya aspek kualitas dalam perencanaan	- Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya - Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah - Bidang Ekonomi - Bidang Litbang dan Evlap														

				pembangunan daerah	- Bidang Sekretariat daerah
		Keterangan			
		1) Persentase capaian kinerja OPD	Persentase capaian kinerja OPD dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Jumlah Kinerja OPD yang tercapai targetnya}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100$	Laporan hasil monev program dan kegiatan	- Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya - Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah - Bidang Ekonomi
		2) Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan	Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan daerah dalam yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pembangunan}}{\text{Jumlah seluruh dokumen perencanaan pembangunan}} \times 100$	Data Laporan Bidang Perencanaan Pembangunan	- Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya - Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah - Bidang Ekonomi - Bidang Sekretariat
		3) Persentase perencanaan pembangunan OPD berlandaskan inovasi melalui penguatan penelitian & pengembangan	persentase perencanaan pembangunan OPD berlandaskan inovasi melalui penguatan penelitian & pengembangan dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\text{perencanaan pembangunan OPD berlandaskan inovasi melalui penguatan penelitian & pengembangan}}{\text{Total perencanaan pembangunan OPD}} \times 100$	Data Laporan Capaian Inovasi Daerah	- Bidang Litbang dan Evlap
17	Inspektorat				
a	Terwujudnya SDM Inspektorat yang profesional dan kompeten	1) Level kapabilitas APIP	Nilai Hasil Kapabilitas APIP yang dikeluarkan oleh BPKP	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP yang dikeluarkan oleh BPKP	- Irban Wilayah I, II dan III
b	Meningkatkan kualitas penerapan SPIP di Pemko Pariaman	1) Nilai Maturitas SPIP	Hasil Nilai Maturitas SPIP oleh BPKP	Hasil Penilaian Maturitas SPIP oleh BPKP	- Irban Wilayah I, II dan III

c	Meningkatnya Kinerja Pengawasan	1) Presentase Penyelesaian Program Kerja Pemeriksaan Tahunan	Persentase Penyelesaian Program Kerja Pemeriksaan Tahunan dalam perumusan kebijakan pembangunan dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Jumlah Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Yang di Selesaikan}}{\text{Jumlah Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Yang Seharusnya di Selesaikan}} \times 100$	Data Laporan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan	- Irban Wilayah I, II dan III
18 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah					
a	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	1) Opini BPK atas LKPD Kota Pariaman tahun n-1	Opini BPK terhadap LKPD	Hasil penilaian BPK terhadap LKPD	- Bidang Akuntansi & Perbendaharaan - Bidang Anggaran - Bidang Aset
b	Meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah	1) Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Total Realisasi PAD (n-1)}}{\text{Total Realisasi Pendapatan (n-1)Dimiliki}} \times 100$	Laporan PAD	- Bidang Pendapatan
19 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM					
a	Meningkatnya Profesional ASN	1) Indeks Profesional ASN	Indeks Profesional ASN dapat dihitung dengan rumus :	Laporan Penghitungan Nilai Indeks Profesional ASN	- Sekretariat - Bidang Mutasi dan Informasi - Bidang Pengembangan SDM dan Pembinaan Aparatur
20 Sekretariat Daerah					
a	Meningkatnya Kebijakan tata kelola pemerintahan dan kinerja pemerintah daerah	1) Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Hasil penilaian EKPPD oleh Kemendagri/Tim	Laporan hasil penilaian EKPPD	- Bagian Pemerintahan Sekdako
		2) Nilai SAKIP	Nilai hasil evaluasi AKIP oleh KemenPANRB	Laporan Hasil evaluasi AKIP	- Bagian Organisasi & Aparatur

				KemenPAN-RB	
b	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1) Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM (n-1)	Laporan Hasil Survei IKM	- Bagian Ekbang, Bagian Hukum dan Bagian Kesra serta Bagian Umum & Protokoler
21	Sekretariat DPRD				
a	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan/agenda Anggota DPRD	1) Nilai IKM	Nilai IKM (n-1)	Laporan hasil penilaian IKM dari Anggota DPRD	- Bagian Umum dan Keuangan - Bagian Persidangan & Per Undang-Undangan - Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasab
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
a	Mewujudkan ketangguhan daerah dalam mengurangi resiko bencana	1) Indeks Ketahanan Daerah	Nilai IKD (n-1)	Hasil Penghitungan Nilai IKD	- Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan - Bidang Rehabilitasi Rekontruksi - Bidang Kedaruratan dan Logistik
23	Kesbangpol				
a	Mewujudkan masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berdemokrasi	1) Indeks Demokrasi	Penilaian Indeks Demokrasi	Hasil Survei Indeks Demokrasi	- Kasi Kesatuan Bangsa - Kasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan

b	Menurunnya Konflik Sosial	1) Persentase penurunan angka konflik sosial	Persentase penurunan angka konflik sosial dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Jumlah Konflik Sosial Tahun (n)} - \text{Jumlah Konflik Sosial Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah Konflik Sosial Tahun (n)}} \times 100$	Data Laporan Jumlah Konflik Sosial	- Kasi Hubungan Antar Lembaga - Kasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan
24 Kecamatan Pariaman Utara					
a	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1) Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM (n-1)	Laporan Hasil Survey	- Sub. Bagian Umum dan Program - Seksi Pemerintahan
b	Meningkatnya kemandirian masyarakat Desa	1) Jumlah Desa Mandiri	Penilaian Status Desa atau Jumlah Desa Mandiri Tahun (n)	Laporan Hasil Penilaian Status Desa	- Seksi Pemberdayaan Masyarakat
c	Menurunnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	1) Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	Persentase penurunan Gangguan Kamtibmas dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Jumlah Data Gangguan Kamtibmas Tahun (n)} - \text{Jumlah Data Gangguan Kamtibmas Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah Data Gangguan Kamtibmas Tahun (n-1)}} \times 100$	Laporan tentang gangguan kamtibmas	- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum - Seksi Kesejahteraan Sosial
25 Kecamatan Pariaman Tengah					
a	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1) Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM (n-1)	Laporan Hasil Survey	- Sub. Bagian Umum dan Program - Seksi Pemerintahan
b	Meningkatnya kemandirian masyarakat Desa	1) Jumlah Desa Mandiri	Penilaian Status Desa atau Jumlah Desa Mandiri Tahun (n)	Laporan Hasil Penilaian Status Desa	- Seksi Pemberdayaan Masyarakat

c	Menurunnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	1) Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	Persentase penurunan Gangguan Kamtibmas dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Jumlah Data Gangguan Kamtibmas Tahun (n)} - \text{Jumlah Data Gangguan Kamtibmas Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah Data Gangguan Kamtibmas Tahun (n-1)}} \times 100$	Laporan tentang gangguan kamtibmas	- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum - Seksi Kesejahteraan Sosial
26 Kecamatan Pariaman Selatan					
a	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1) Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM (n-1)	Laporan Hasil Survey	- Sub. Bagian Umum dan Program - Seksi Pemerintahan
b	Meningkatnya kemandirian masyarakat Desa	1) Jumlah Desa Mandiri	Penilaian Status Desa atau Jumlah Desa Mandiri Tahun (n)	Laporan Hasil Penilaian Status Desa	- Seksi Pemberdayaan Masyarakat
c	Menurunnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	1) Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	Persentase penurunan Gangguan Kamtibmas dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\text{Jumlah Data Gangguan Kamtibmas Tahun (n)} - \text{Jumlah Data Gangguan Kamtibmas Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah Data Gangguan Kamtibmas Tahun (n-1)}} \times 100$	Laporan tentang gangguan kamtibmas	- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum - Seksi Kesejahteraan Sosial
27 Kecamatan Pariaman Timur					
a	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1) Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM (n-1)	Laporan Hasil Survey	- Sub. Bagian Umum dan Program - Seksi Pemerintahan
b	Meningkatnya kemandirian masyarakat Desa	1) Jumlah Desa Mandiri	Penilaian Status Desa atau Jumlah Desa Mandiri Tahun (n)	Laporan Hasil Penilaian Status Desa	- Seksi Pemberdayaan Masyarakat

	Menurunnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	1) Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	<p>Persentase penurunan Gangguan Kamtibmas dapat dihitung dengan rumus :</p> $\frac{\text{Jumlah Data Gangguan Kamtibmas Tahun (n)} - \text{Jumlah Data Gangguan Kamtibmas Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah Data Gangguan Kamtibmas Tahun (n-1)}} \times 100$	Laporan tentang gangguan kamtibmas	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum - Seksi Kesejahteraan Sosial
--	--	--	---	------------------------------------	---

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPEDA)**

KOTA PARIAMAN

JLN. IMAM BONJOL NO 44
KOTA PARIAMAN – SUMATERA BARAT
INDONESIA
TELP : (0751) 93553 Fax. (0751) 98757
Email : Bappedakotapariaman@gmail.com
WWW.pariamankota.go.id

Copyrights 2019

